

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 1 Nomor 3 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di KPU Kabupaten Boyolali)**

**Wibowo Saputra**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Wibowosaputra971@gmail.com*

### **Abstrak**

The participation of public politics in the implementation of elections is a very important aspect, so the General Election Commission uses strategies aimed at improving the participation of the community in the implementation of the elections in 2019. This research aims to determine the strategy of the General Election Commission of Boyolali district in increasing public participation in the elections. This research uses the type of empirical research with a qualitative approach, then using methods of data collection in the form of interviews and documentation. Infotman in the study of this time is the KPU Boyolali district by adjusting to the topic of discussion. The results showed that the KPU strategy of Boyolali District in increasing community participation focuses more on socialization of the important segments of Boyolali. Then the factor that affects community participation is the education and political awareness of the society. In Islam there are also institutions in charge of choosing the head of State, the institution *Ahlul Halli Wal-Aqin* carrying its duty to choose the head of State using deliberation.

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu merupakan aspek yang sangat penting, sehingga Komisi Pemilihan Umum menggunakan strategi yang bertujuan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, kemudian memakai metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Infotman pada penelitian kali ini adalah KPU Kabupaten Boyolali dengan menyesuaikan dengan topik bahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lebih berfokus kepada sosialisasi kepada segmen-segmen penting di Boyolali. Kemudian faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pendidikan dan kesadaran politik masyarakatnya. Dalam Islam terdapat pula lembaga yang bertugas memilih kepala negara, lembaga *Ahlul Halli Wal-Aqdi* dalam menjalankan tugasnya memilih kepala negara menggunakan musyawarah.

## **Kata Kunci : Masyarakat; Pemilu; Strategi**

### **Pendahuluan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu. Semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara ini. Semakin partisipasi masyarakat meningkat maka kualitas pemilu juga akan meningkat dalam hal jumlah suara yang diperoleh, partisipasi ini merupakan wadah untuk pembelajaran politik bagi masyarakat secara langsung maupun tak langsung.

Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 18 ayat j yang berbunyi “mensosialisasi kan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”<sup>1</sup>. KPU dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk mensosialisasikan segala hal terkait teknis pemilihan umum kepada masyarakat.

Kabupaten Boyolali adalah salah satu Kabupaten di Provinsi di Jawa Tengah yang mempunyai luas sekitar 1.015 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 19 Kecamatan dengan jumlah penduduk 974.579 ditahun 2017 dengan kenaikan laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 0,54%<sup>2</sup> Pada Pemilu tahun 2014 partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali dalam pemilihan presiden dan Wakil Presiden sebesar 609.377 dari jumlah seluruh pemilih sebesar 806.819 atau sebesar 75,53%<sup>3</sup> dari target di Nasional KPU RI adalah minimal 75%. Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 Kabupaten Boyolali berada di urutan 9 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa tengah dalam hal angka partisipasi sebesar 74,90%<sup>4</sup> dengan jumlah pemilih total sebesar 781.650 dengan partisipasi sebesar 585.476 jiwa. Apabila diamati terjadi penurunan sebesar 0.63%. dari data ini dpat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat menurun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Salah satu misi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali ini yaitu ingin meningkatkan angka kesadaran politik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2019. Dari latar belakan inilah sangat penting untuk diketahui bagaimanakah strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali, kemudian faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini. Juga ditambah dengan sedikit kajian tentang lembaga *Ahlul Halli Wal- 'Aqdi* yang juga bertugas dalam wewenangnya untuk memilih kepala negara.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali

<sup>3</sup> Dari jumlah daftar pemilih tetap KPU Boyolali sejumlah 806.819, angka partisipasi yang ikut andil memberikan suara adalah sejumlah 609.377

<sup>4</sup> Data rekapitulasi Pemilihan Gubernur KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

## Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris<sup>5</sup> dengan pendekatan kualitatif<sup>6</sup>. Karena dalam proses menyusun dan mengerjakan artikel ini penulis terjun langsung dalam pengambilan data serta hasil yang didapatkan berupa data buka angka. Lokasi penelitian ini adalah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.16, Bangunharjo, Siswodipuran, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57316. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## Hasil Penelitian

### Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.<sup>7</sup>

Seperti yang dipaparkan di latar belakang bahwa angka partisipasi masyarakat Boyolali mengalami penurunan sebesar 0,63% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sebanyak 820.707<sup>8</sup> orang telah terdaftar sebagai pemilih di pemilu tahun 2019. Tentu dalam hal ini menjadi tugas dari KPU Kabupaten Boyolali untuk lebih memperhatikan peningkatan perolehan angka partisipasi politik pemilih KPU sebagai pelaksana dari pemilihan umum harus memiliki berbagai strategi agar di tahun 2019 ini partisipasi masyarakat bisa meningkat. Beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi tatap muka

Artinya pada sosialisasi metode ini dapat dilakukan dengan cara KPU Kabupaten Boyolali berkomunikasi langsung pada masyarakat pada beberapa segmen, yang akan disosialisasikan tentang pengetahuan atau wawasan mengenai pemilu yang akan datang dan membuat mereka terdorong untuk ikut serta dalam partisipasi, hal semacam ini dilakukan dengan cara seminar, sarahsehan dan lain sebagainya.

##### 1.1 Pelaksanaan sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu ini merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjadi hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. KPU Kabupaten Boyolali dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum 2019, tindakan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi dengan target sasaran yaitu kepada delapan segmen pemilih:

<sup>5</sup> Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang diperoleh secara langsung dari responden terkait fakta-fakta hukum yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah ( Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 106)

<sup>6</sup> Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). 262

<sup>7</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

<sup>8</sup> Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2019

a) Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali kepada segmen pemilih pemula

Materi yang disampaikan oleh KPU telah disesuaikan dengan segmen ini. Hal tersebut dapat dilihat dari muatan materi sosialisasi yang disampaikan yaitu lebih berorientasi untuk membangun pemahaman, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting untuk seluruh wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK sederajat dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun yang secara pemahaman dan pengalaman mengenai pemilu masih minim. Metode yang digunakan dalam sosialisasi pada segmen ini adalah berupa tatap muka dengan pola penyampaian seperti ceramah, dialog, simulasi serta permainan game yang berisikan pesan-pesan kepemiluan.

b) Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali kepada Segmen Pedagang

KPU menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal dan program pemilihan, menghimbau kepada pedagang untuk menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan, dari materi-materi tersebut sudah menerangkan tentang gambaran umum pemilu yang akan berlangsung, serta dapat mendorong keterlibatan pedagang untuk menggunakan hak pilihnya. Metode yang dilakukan oleh KPU dalam menghadapi segmen ini adalah berupa tatap muka dengan pola seperti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, pamphlet, poster dll. KPU memilih menggunakan metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan aktifitas pedagang.

c) Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali kepada segmen masyarakat adat

Materi yang disampaikan oleh KPU yaitu mencakup informasi tentang tahapan, , jadwal, dan program pemilihan serta himbauan kepada masyarakat adat untuk ikut memberikan hak pilihnya di pemilu 2019. Sosialisasi terhadap segmen ini sangat penting dikarenakan masyarakat adat ini mempunyai pengaruh di masyarakat umum, sehingga dapat diajak kerjasama dalam hal menyebarluaskan informasi tentang pemilu kepada masyarakat umum.

Metode yang dilakukan berupa tatap muka dengan model ceramah, dialog, simulasi tentang tata cara pencoblosan yang benar serta pembagian alat peraga sosialisasi. Metode ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat adat tentang pentingnya partisipasinya pada pelaksanaan pemilu, serta mencegah terjadinya kesalahan saat pencoblosan.

d) Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali kepada segmen masyarakat disabilitas

KPU dalam segmen ini selain memberikan informasi terkait pemilu juga lebih kearah motivasi serta dukungan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dengan memberikan perlakuan khusus kepada mereka saat pelaksanaan pemilu, dengan begitu akan mampu menekan angka golput dari masyarakat segmen ini. Metode yang dilakukan adalah berupa pola ceramah serta dialog dan juga melakukan simulasi pencoblosan , KPU juga ingin menjalin ikatan emosional dengan masyarakat penyandang disabilitas

e) Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali kepada segmen pemilih komunitas

Sosialisasi yang disampaikan berupa ajakan kepada pemilih komunitas untuk menggunakan hak suaranya pada saat pencoblosan, penyampaian tentang tanggal

pelaksanaan pemilu serta pengenalan kandidat, target dari komunitas ini adalah yaitu komunitas gomes, pecinta alam, kelompok tani dan lain-lain. Metode yang dilakukan adalah seperti simulasi game, dialog serta pembagian alat peraga. Pelaksanaan sosialisasi dibuat sesuai dengan kelompok masing-masing misalnya kepada kelompok pecinta alam, KPU membuat sosialisasi seperti perkemahan, dan lain sebagainya.

f) Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali kepada segmen masyarakat agama

Materi muatan yang disampaikan meliputi informasi tentang tahapan jadwal, program pemilihan, informasi pasangan paslon, serta ajakan dalam memberikan hak suaranya di pemilu tahun 2019 ini. Sedangkan sasaran pelaksanaan pada segmen ini, meliputi organisasi keagamaan, jamaah pengajian, kelompok pemilih perempuan, jamaah tahlil, serta umat gereja, masyarakat hindu dan budha. menggunakan metode tatap muka dengan bentuk ceramah, dialog, simulasi disertai dengan pembagian alat peraga pemilu

g) Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali kepada masyarakat umum

Sasaran dari segmen ini adalah seluruh masyarakat umum yang berada di setiap Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Boyolali. karena sasarannya adalah masyarakat umum maka metode yang digunakan yaitu berupa tatap muka, serta penggunaan media massa. metode pada tatap muka kali ini adalah berupa ceramah, dialog, serta pembagian alat peraga sosialisasi dengan memanfaatkan aktivitas warga. media massa ini menggunakan media cetak, media sosial media elektronik, dan media publik lainnya.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

Menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah/Negara.<sup>9</sup> Konsep partisipasi politik di Negara demokratis didasari bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan masa depan bersama.<sup>10</sup>

Seperti yang telah tertulis didalam Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 18 j bahwa KPU memiliki tugas “mensosialisasi kan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Dari pasal ini memang jelas menunjukkan tugas wajib dari KPU Kabupaten/Kota, yang memang itu faktor pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

#### 1. Pendidikan

Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan Negara. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak

<sup>9</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) 63

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisike 3, 1998) 3

dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu.

## 2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. “Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis)”.

Faktor Teknis pemilih, di mana pada saat pemilihan harus bekerja diluar kota, atau sedang sakit, sikap Apatis pemilih terhadap pelaksanaan pemilu yang tidak bisa membawa dampak secara langsung kepada mereka, Kurangnya Sosialisasi baik oleh penyelenggara, pemerintah ataupun peserta sendiri dalam bentuk kampanye, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif,.

### **Strategi Ahlul-Halli Wal-‘Aqdi dalam Memilih Kepala Negara**

Secara terminology kata *siyasah* menurut pendapat Syaikh Bdul Wahab Khallaf ialah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata “ *Dusturiyah*” sendiri secara bahasa berasal dari kata “*dustur*” yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis ( Konstitusi ) maupun yang tidak tertulis (Konvensi)<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* yakni cabang *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan oilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas mengenai konsep negara hokum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi<sup>12</sup>

Untuk prinsip musyawarah dalam Hukum Tata Negara Islam sendiri, musyawarah dilakukan sebagai alrnatif mencari solusi dalam memecahkan suatau permasalahan sehingga musyawarah tidak bisa dilakukan dengan seenaknya saja tanpa mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Adanya musyawarah untuk memecahkan permasalahan sehingga diperlukan suara-suara dari pihak yang bermusyawarah sehingga tercipta kata sepakat.

Jika ahlul-halli wal-‘aqdi berkumpul (musyawarah) untuk memilih pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu, kemudian mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai konduite bagus dimata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membaiaatnya dan tidak

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta :Gaya media Persada, 2001),153

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta :Gaya media Persada, 2001),154

menentanginya. Dari paparan diatas terlihat memang lembaga *ahlul-halli wal- 'Aqdi* ini memang diberikan wewenang untuk memilah dan memilih kandidat kepala negara. Dan juga dapat disimpulkan juga bahwa lembaga *ahlul-halli wal- 'Aqdi* dalam memilih kepala negara menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari negara yang akan dipimpin oleh kepala negara tersebut

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dimuka maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019 lebih fokus terhadap sosialisasi menyeluruh dengan mengemas informasi seringan mungkin agar dapat diserap oleh masyarakat. Kpu Kabupaten Boyolali melakukan sosialisasi ke tujuh segmen yaitu; (1) segmen pemilih pemula, (2) segmen pedagang, (3) segmen masyarakat adat, (4) masyarakat disabilitas, (5) segmen pemilih komunitas, (6) masyarakat umum, (7) masyarakat agama.. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah tingkat pendidikan dan kesadaran poliyik, yang mana hal ini adalah menjadi tugas besar bagi KPU Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara pemilihan umum.. Lembaga *Ahlul Halli Wal- 'Aqdi* memilih kepala negara menggunakan cara bermusyawarah, strategi yang lembaga ini gunakan adalah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara itu sendiri atas kepala negaranya

### **Daftar Pustaka**

- Ali. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Amiruddin. *Pengantar Penelitan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali
- Budiarjo. Miriam, *Partisipasi dan Partai Poltik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisike 3 , 1998)
- Data rekapitulasi Pemilihan Gubernur KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
- Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta :Gaya media Persada, 2001)
- Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2019
- Rozali, Abdullah *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012)
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

